

PERJUANGAN ORGANISASI PEREMPUAN INDONESIA MENUNTUT HAK PENDIDIKAN PADA MASA KOLONIAL BELANDA TAHUN 1912-1928

Siwi Tyas Fheny Cahyani, Kayan Swastika, Sumarjono.
Program Studi Pendidikan Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: kayanswastika@yahoo.co.id

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah kaum perempuan Indonesia pada masa kolonial Belanda belum sepenuhnya dapat mengenyam pendidikan yang layak. Pemerintah kolonial membatasi pendidikan bagi kaum perempuan. Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial mengenai pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah mengatur bahwa pendidikan hanya diberikan untuk kalangan elit dan dikhususkan untuk kaum laki-laki. Fasilitas pendidikan yang diberikan oleh Belanda kepada kaum bumiputera sangat terbatas. Secara umum, sistem pendidikan khususnya sistem persekolahan didasarkan kepada golongan penduduk menurut keturunan atau lapisan (kelas) sosial yang ada dan menurut golongan kebangsaan yang berlaku waktu itu. Selain itu, kaum perempuan di Indonesia juga mendapatkan kekangan adat istiadat dan diskriminasi dari kaum laki-laki. Kaum perempuan selalu mendapat perlakuan yang sewenang-wenang dan selalu dinomor-duakan dalam segala hal. Kaum perempuan hanya segelintir saja yang memperoleh pendidikan yang sama dengan laki-laki. Sehingga hal ini berdampak pada pola pikir dan budaya yang berkembang terhadap pandangan mengenai posisi kaum perempuan. Kondisi demikian membuat penelitian ini menarik untuk dikaji karena kaum perempuan berjuang untuk mendapatkan hak pendidikannya dengan membentuk organisasi-organisasi perempuan yang bertujuan untuk memberi pendidikan bagi gadis-gadis pribumi untuk menjadi cerdas, terampil dan mandiri. Melalui organisasi tersebut, kaum perempuan bersatu untuk mendapatkan hak pendidikannya dan kesetaraan kedudukan perempuan dengan kaum laki-laki.

Kata Kunci: Perjuangan Organisasi Perempuan Indonesia, Menuntut Hak Pendidikan, Masa Kolonial Belanda

ABSTRACT

The background of this research is Indonesian women's in the Dutch Colonial period has not been fully educated. The colonial government restricts education for women. The colonial government applied an education policy in Indonesia, which is to regulate that education is given only to elite and local men. The educational facilities for the Native is limited by the Dutch. The education system, especially the school system based on the type of people by generation or level (class) social and classified in nationality accordance at that time in the other hand. Women in Indonesia are restrained and discriminated by the men. The women are always in arbitrary treated and emphasized in everything. Only a few women who receive education same with men. It has an impact on the mindset and culture that developed over the views on the women position. That condition makes this research interesting to study because women fought for the right to education by forming women's organizations which aims to provide education for indigenous girls to be smart, independent and skilled. Through those organizations, women united together to get right on education and the women position equality with men.

Keywords: Indonesian women's organizations struggle, demanding the education right, Dutch colonial period

A. PENDAHULUAN

Permulaan abad XX merupakan masa kebangkitan nasional bangsa Indonesia. Salah satunya karena dampak dari politik etis yang diberlakukan oleh Belanda. Politik etis atau "*Ethische Politik* " merupakan kebijaksanaan yang muncul atas dasar pengaruh beberapa orang Belanda yang menunjukkan adanya "*eeresschuld*" (hutang budi) negeri Belanda terhadap jajahannya yang telah sekian lama memberi keuntungan. Salah satu dampak yang ditimbulkan dari politik etis ini, yaitu dengan adanya peningkatan kesejahteraan di Indonesia pada bidang edukasi atau lazimnya disebut pendidikan (Suryocondro,1984:70).

Politik etis ini telah memberikan peranan yang baik dalam pendidikan dan meningkatkan pendidikan umum untuk rakyat. Melalui politik etis, pemerintah Hindia Belanda memberikan kesempatan kepada penduduk bumiputera untuk memperoleh fasilitas pendidikan. Namun, yang lebih mendapatkan pendidikan adalah kaum laki-laki, sedangkan kaum perempuan mendapatkan diskriminasi dan keterbatasan untuk memperoleh akses pendidikan. Akses pendidikan pada masa pemerintahan kolonial Belanda dibagi dalam lapisan kelas sosial masyarakat yaitu lapisan atas dan lapisan bawah. Lapisan atas diperuntukkan kalangan aristokrat atau keturunan bangsawan, sedangkan lapisan bawah diperuntukkan rakyat jelata. Adanya diskriminasi dan keterbatasan pendidikan tersebut, menjadikan perempuan bangkit untuk memperoleh fasilitas pendidikan. Sebelum diberlakukannya politik etis, kondisi perempuan Indonesia belum sepenuhnya sejahtera dalam mengenyam pendidikan, sehingga kedudukan sosialnya pun juga belum sepenuhnya mendapat perlakuan yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Perempuan lebih cenderung berada dalam wilayah domestik, bahkan sering disebut sebagai perabot dapur. Sungguh, suatu kondisi yang masih sangat jauh dari kemajuan, Ki Hajar Dewantara (dalam Soekarno, 1963:58).

Kaum perempuan pada masa kolonial Belanda juga belum mendapatkan hak yang sama dalam bidang politik dan hak pilih. Bahkan, kaum perempuan dipaksa untuk menikah usia dini. Pada masa ini, perempuan dianggap sebagai makhluk kelas dua, artinya kedudukan perempuan-perempuan Indonesia berada di bawah kedudukan kaum laki-laki. Munculnya politik etis, dengan salah satu kebijakannya yaitu dalam memperluas bidang pendidikan, menimbulkan perubahan di kalangan rakyat Indonesia terutama perubahan pada kaum perempuan. Adat istiadat juga yang menghalangi anak-anak perempuan untuk mendapatkan pengajaran atau pendidikan. Anak-anak perempuan banyak yang tidak boleh keluar rumah dan hanya berdiam diri di dalam rumah. Melihat kondisi perempuan yang menyedihkan dan mendapatkan diskriminasi, maka timbullah cita-cita kaum perempuan untuk bangkit mendapatkan dan memperjuangkan hak pendidikannya, yaitu melalui kesadaran untuk berorganisasi, dengan cara membentuk organisasi-organisasi perempuan Indonesia. Organisasi-organisasi tersebut bertujuan sama, memberi pendidikan bagi gadis-gadis pribumi untuk menjadi cerdas, terampil dan mandiri. Organisasi-organisasi pada masa ini bersifat umum dan sukarela, dalam arti bahwa kaum perempuan pada umumnya asal memenuhi syarat umur, kewarganegaraan dan menyetujui tujuan organisasi dapat menjadi anggota atas permintaan sendiri. (Suryocondro:1984:130).

Berbicara mengenai organisasi, tentu saja tidak lepas dari perjuangan pahlawan-pahlawan perempuan sebelumnya, yang mengantarkan kepada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai sekarang ini. Zaman kolonial Belanda banyak dikenal pejuang-pejuang perempuan, antara lain Martha Christina Tiahahu dari Maluku, Raden Ayu Ageng Serang dari Jawa, Cut Nyak Dien dari Aceh, Cut Meutia dari Aceh. Perempuan-perempuan tersebut berjuang melawan Belanda dengan memanggul senjata untuk mengusir penjajah dari Bumi Indonesia. Kemudian juga dikenal tokoh pejuang emansipasi perempuan, antara

lain R.A Kartini, Maria Walanda Maramis, Dewi Sartika, Nyi. H. Achmad Dahlan yang berjuang dalam bidang pendidikan untuk memajukan kaum perempuan. Apabila berbicara soal pendidikan, maka tidak dapat dilupakan jasa-jasa Kartini, yang paling terkenal di antara semua pejuang perempuan tersebut. Kartini merupakan inspirator bagi perempuan Indonesia untuk bangkit memperoleh hak pendidikan. Pemikirannya yang aneh dan menyalahi adat pada jamannya saat itu, justru menjadi tonggak sejarah bangkitnya perjuangan perempuan dalam mengalahkan tirani dan penindasan terhadap dirinya. Perempuan-perempuan Indonesia dengan diberi pendidikan, maka akan lebih cakap menunaikan tugas utamanya sebagai pendidik pertama dari manusia. Di samping diberi pelajaran membaca, menulis, menghitung dan lain sebagainya, kaum perempuan juga diberi keterampilan sehingga nantinya menjadikan perempuan dapat bersikap mandiri. (Fauzie,1993:87).

Atas prakarsa Boedi Oetomo, maka dalam tahun 1912 didirikan perkumpulan perempuan yang pertama di Jakarta yang dinamakan "Poetri Mardika". Tujuan perkumpulan ini adalah memberi bantuan, bimbingan dan penerangan kepada gadis pribumi dalam usaha menuntut pelajaran, memberi kesempatan kepada kaum perempuan untuk bertindak di luar rumah tangga dan menyatakan pendapatnya di muka umum, berusaha menghilangkan rasa rendah pada perempuan dan meninggikan derajatnya sehingga setingkat dengan kaum laki-laki. Setelah itu, banyak organisasi-organisasi perempuan yang muncul seperti Pawijatan Wanito di Magelang (1915), "PIKAT" – Percintaan Ibu Kepada Anak Temurun di Manado (1917), Purborini di Tegal (1917), Aisyiah di Yogyakarta (1917), Wanito Soesilo di Pemalang (1918), Wanito Hadi di Jepara (1919), Wanito Moeljo di Yogyakarta (1920) (Suryocondro,1984:85).

Kesadaran Nasional yang bangkit pada awal abad ke-20 telah meluas pada kaum perempuan, tidak saja di pulau Jawa tetapi juga di Sumatera, Sulawesi, Ambon dan

lain-lain. Timbul bagian perempuan dari organisasi atau partai yang telah ada. Organisasi-organisasi perempuan yang berkembang sebelum tahun 1920 telah menekankan perjuangannya pada perbaikan kedudukan sosial dalam perkawinan, keluarga, peningkatan kecakapan sebagai ibu, pemegang rumah tangga dengan jalan pendidikan dan pengajaran serta peningkatan keterampilan khusus perempuan. Sesudah tahun 1920, jumlah organisasi perempuan bertambah banyak. Kesediaan kaum perempuan untuk terlibat dalam kegiatan organisasi lebih meningkat dan kecakapan bertindak dalam organisasi pun bertambah maju. Hampir di semua tempat yang penting ada perkumpulan perempuan. Hal ini disebabkan karena kesempatan belajar yang makin berkembang ke bawah, sehingga jumlah perempuan yang mampu beraksi juga bertambah luas dan tidak lagi terbatas pada lapisan atas saja. (Kowani,1986:43).

Pada tahun 1921 didirikan Wanito Utomo dan tahun 1924 Wanito Katholik, kedua-duanya didirikan di Yogyakarta. Bagian wanita dari Sarekat Ambon yaitu INA TUNI didirikan tahun 1927, untuk membantu aksi Sarekat Ambon di kalangan militer Ambon. INA TUNI berhaluan politik Sarekat Ambon. Organisasi pemuda pelajar juga mendirikan bagian wanita/pemudi misalnya Jong Java Meisjeskring, Wanita Taman Siswa (1922), Jong Islamiyeten Bond Dames Afdeeling (1925) dan Putri Indonesia (1927). Pada tahun 1928 berdiri organisasi-organisasi Putri Setia di Manado, Wanita Perti sebagai bagian dari Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), dan Dameskransje Help Elkander (Sahati) di Jakarta (Kowani,1986:43).

Menjelang tahun 1928, organisasi perempuan berkembang lebih pesat. Di samping jumlahnya bertambah, juga cara perjuangannya maupun ruang lingkungannya tidak sama. Ada yang tidak mencampuri politik seperti Aisyiyah, sebaliknya ada yang mulai berhaluan politik seperti INA TUNI. Ada yang terbatas pada lapisan masyarakat tertentu, ada yang keanggotaannya lebih luas. Ada yang sekedar berfungsi sebagai perkumpulan kekeluargaan dengan kesempatan

belajar keterampilan perempuan, ada pula yang mempunyai tujuan yang lebih nyata dan terarah untuk kepentingan masyarakat. Sikap yang dinyatakan oleh organisasi-organisasi perempuan pada waktu itu umumnya lebih tegas, berani dan terbuka. Organisasi-organisasi tersebut telah membuka “sangkar” perempuan bangsawan atau perempuan dari golongan atas dan menengah yang biasanya dipingit atau dikurung di dalam rumah. Kemudian pada tahun 1928 di Yogyakarta diadakan Kongres Perempuan Indonesia pertama. Pokok-pokok yang dibahas adalah masalah pendidikan, reformasi perkawinan, koedukasi (perempuan dan laki-laki bersama-sama sekolah dalam satu kelas), dan poligami. Pada kongres tersebut juga dibentuk Persatuan Perempuan Indonesia (PPI), yang setahun kemudian diubah menjadi Perikatan Perhimpunan Perempuan Indonesia (PPPI) (Soewondo,1984:197).

Permasalahan

1. Bagaimana kondisi pendidikan kaum perempuan Indonesia pada masa kolonial Belanda sebelum tahun 1912?
2. Bagaimana usaha-usaha organisasi perempuan Indonesia menuntut hak pendidikan pada masa kolonial Belanda tahun 1912-1928?
3. Bagaimana hasil perjuangan organisasi perempuan Indonesia menuntut hak pendidikan pada masa kolonial Belanda tahun 1912-1928?

Tujuan Penelitian

1. Memahami kondisi pendidikan kaum perempuan Indonesia pada masa kolonial Belanda sebelum tahun 1912.
2. Memahami usaha-usaha organisasi perempuan Indonesia menuntut hak pendidikan pada masa kolonial Belanda tahun 1912-1928.

3. Memahami hasil perjuangan organisasi perempuan Indonesia menuntut hak pendidikan pada masa kolonial Belanda tahun 1912-1928.

Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis: sebagai sarana latihan dalam melakukan penelitian dan penulisan karya ilmiah, latihan berfikir dan memecahkan masalah secara kritis dan logis memperdalam pengetahuan tentang perjuangan organisasi perempuan Indonesia menuntut hak pendidikan pada masa kolonial Belanda tahun 1912-1928.
2. Bagi mahasiswa dan calon guru sejarah: dapat menambah perbendaharaan ilmu perjuangan organisasi perempuan Indonesia menuntut hak pendidikan pada masa kolonial Belanda tahun 1912-1928.
3. Bagi ilmu pengetahuan: dapat menambah perbendaharaan ilmu perjuangan organisasi perempuan Indonesia menuntut hak pendidikan pada masa kolonial Belanda tahun 1912-1928.
4. Bagi Almamater: merupakan perwujudan dari salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu yang berkaitan dengan Dharma penelitian dan pengembangan ilmu.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau (Gottschlak,1985:32). Langkah-langkah dalam metode penelitian sejarah terdiri dari 4 (empat) langkah atau tahapan yang berurutan yaitu: heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi (Abdurrahman,2007:54).

Langkah pertama dalam melakukan penulisan sejarah adalah heuristik. Heuristik merupakan suatu kegiatan dalam mengumpulkan sumber-sumber atau jejak-jejak sejarah masa lampau yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis dalam kegiatan ini mencari dan mengumpulkan bahan-bahan atau jejak-

jejak sejarah yang berkaitan dengan “Perjuangan Organisasi Perempuan Indonesia Menuntut Hak Pendidikan Pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1912-1928”.

Langkah kedua dalam penulisan sejarah adalah melakukan kritik. Kritik atau verifikasi adalah langkah yang dilakukan untuk memperoleh keabsahan sumber-sumber yang digunakan dan untuk memperoleh data yang kredibel, mengingat peristiwa masa lalu tidak mungkin terulang pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang, sehingga dibutuhkan rekonstruksi masa lampau yang berdasarkan fakta sejarah yang ada (Abdurrahman, 2007 : 68). Kritik sumber dilakukan secara intern dan ekstern. *Kritik intern*, digunakan untuk meneliti kredibilitas/ kebenaran isi sumber sejarah. *Kritik ekstern*, dilakukan untuk menilai dan menguji keabsahan tentang keaslian (*otentisitas*) sumber.

Langkah berikutnya adalah Interpretasi. Interpretasi sejarah sering juga disebut sebagai analisis sejarah. Dalam hal ini, ada dua metode yang digunakan, yaitu analisis dan sintesis. Analisis berarti menguraikan, sedangkan sintesis berarti menyatukan. Interpretasi merupakan usaha untuk mewujudkan rangkaian fakta-fakta yang mempunyai kesesuaian satu sama lain dan dilakukan suatu penafsiran supaya bermakna, Kuntowijoyo dalam (Abdurrahman, 2007:73)

Langkah terakhir adalah historiografi. Historiografi adalah kegiatan merekonstruksi yang imajinatif berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses metode sejarah (Gottschalk, 1983:330). Historiografi yang merupakan cara penulisan, pemaparan atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Pendidikan Kaum Perempuan Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda Sebelum Tahun 1912.

1. Politik Pendidikan Pemerintah Kolonial

Politik pendidikan kolonial, erat hubungannya dengan politik pada umumnya, suatu politik yang

didominasi oleh golongan yang berkuasa dan tidak didorong oleh nilai-nilai etis dengan maksud untuk membina kematangan politik dan kemerdekaan tanah jajahannya. Berhubungan dengan sikap tersebut, dapat dilihat sejumlah ciri politik dan praktik pendidikan tertentu. Prinsip-prinsip politik pendidikan kolonial Belanda di Indonesia terdapat 6 prinsip, diantaranya adalah prinsip dualisme, gradualisme, prinsip kokordansi, kontrol sentral yang ketat, tidak adanya perencanaan pendidikan sistematis dan pendidikan pegawai sebagai tujuan utama sekolah.

2. Sistem Pendidikan Indonesia Abad ke-19 (1800-1899)

Prinsip pendidikan yang diselenggarakan dalam sistem pendidikan abad ke 19 ini adalah:

- a. pemerintah berusaha untuk tidak memihak salah satu agama tertentu.
- b. tidak diusahakan untuk dapat hidup secara selaras dengan lingkungannya, tetapi lebih ditekankan agar supaya anak didik di kemudian hari dapat mencari penghidupan atau pekerjaan demi kepentingan kolonial.
- c. sistem persekolahan disusun menurut adanya perbedaan lapisan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa.
- d. pada umumnya, pendidikan diukur dan diarahkan untuk membentuk suatu golongan Elite Sosial agar dapat dipakai sebagai alat bagi kepentingan atau keperluan supremasi politik dan ekonomi Belanda di Indonesia (Depdikbud, 1985:86).

Oleh karena itu, mula-mula hanya anak-anak pemimpin puncak dan tokoh-tokoh terkemuka saja yang diperkenankan mengikuti pelajaran pada sekolah-sekolah dengan orientasi dan pengetahuan Barat. Kenyataan ini didasarkan kepada cara bagaimana orang Belanda memerintah Indonesia, karena orang-orang Belanda memerintah daerah jajahannya melalui penguasaan tidak langsung. Tepatnya melalui kaum bangsawan Bumiputera. Dengan memberikan prioritas kepada anak-

anak bangsawan, maka diharapkan agar tetap ada “*status quo*” antara rakyat jelata dengan aristokrasi, sedangkan golongan Elite inilah yang dipersiapkan untuk terus memerintah bagi kepentingan Belanda. Pembatasan ini masih dirasakan sampai tahun 1912. Contohnya ialah bahwa dalam salah satu kelas MOSVIA (Sekolah Pangreh Praja) yang terdiri dari empat puluh orang murid, seluruhnya adalah anak-anak kaum aristokrat Bumiputera. Golongan non feodal menyadari bahwa hanya dengan pendidikan seseorang dapat memperoleh status sosial yang baik dan memperbaiki kehidupan. Oleh karena itu, mereka berusaha keras untuk mendirikan sekolah-sekolah swasta yang berorientasi Barat dengan mencoba menerobos pembatasan-pembatasan yang diadakan oleh pemerintah (Depdikbud, 1985:87).

3. Sistem Pendidikan Indonesia Abad ke-20 (1900-1912).

Usaha pendidikan bagi anak di Indonesia untuk pertama kalinya diberikan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada tahun 1848. Kebijakan pemerintah saat itu adalah mendirikan sekolah bagi bumiputera yang bertujuan untuk menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang terampil, murah dan terdidik. Hasil pendidikan itu kemudian dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan industri. Sejak dilaksanakan politik etis pada awal abad ke-20, ada upaya dari beberapa tokoh liberal Belanda, misalnya Van Deventer, untuk mengarahkan pendidikan bagi anak Indonesia demi pembebasan dari ketidakmatangan berdiri di atas kaki sendiri. Di lain pihak, kebutuhan akan tenaga-tenaga terdidik dan ahli telah mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolah secara berjenjang.

Perkembangan sistem pendidikan pada masa Hindia Belanda tidak dapat dipisahkan dari politik etis. Ini berarti bahwa terjadinya perubahan di negeri jajahan (Indonesia) banyak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di negeri Belanda. Tekanan datang dari Partai Sosial Demokrat yang di dalamnya ada van Deventer. Pada tahun 1899, Mr. Courad Theodore van Deventer

melancarkan kritikan-kritikan yang tajam terhadap pemerintah penjajahan Belanda. Kritikan itu ditulis dan dimuat dalam jurnal Belanda “*De Gids*”. Gagasan yang dicetuskan semula oleh Van Deventer pada tahun 1899 dengan mottonya “Hutang Kehormatan” (“*de Eereschuld*”) dimuat dalam majalah atau jurnal “*De Gids*” (Nasution,1987:15). Tulisan tersebut menjelaskan bahwa kekosongan kas negeri Belanda telah dapat diisi kembali berkat pengorbanan orang-orang Indonesia. Oleh karena itu, Belanda telah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Maka dari itu, harus dibayar dengan peningkatan kesejahteraan melalui gagasannya yang dikenal dengan Trilogi Van Deventer. Politik etis ini diarahkan untuk kepentingan penduduk Bumiputera dengan cara memajukan penduduk asli secepat-cepatnya melalui pendidikan.

4. Faktor-Faktor Sosio Kultural dan Politis yang Mempengaruhi Kondisi Pendidikan Kaum Perempuan Indonesia Sebelum Tahun 1912.

4.1 Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Kolonial Terhadap Pendidikan di Indonesia.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial mengenai pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah mengatur bahwa pendidikan hanya untuk kalangan elit dan dikhususkan untuk kaum laki-laki. Fasilitas pendidikan yang diberikan oleh Belanda kepada kaum bumiputera sangatlah terbatas, khususnya untuk kaum perempuan. Akses pendidikan untuk kaum perempuan sangat dibatasi oleh pemerintah Belanda, hal ini karena pemerintah kolonial menganggap bahwa kaum perempuan Indonesia tidak selayaknya dan sepantasnya untuk mendapatkan pendidikan. Munculnya sistem pendidikan kolonial ketika itu tidaklah berbanding lurus dengan kepentingan mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Tujuan pemerintah kolonial mendirikan sekolah bagi kaum bumiputera adalah untuk menghasilkan pegawai administrasi Belanda yang

terampil, murah dan terdidik. Namun ada beberapa hambatan untuk masuk sekolah, yaitu antara lain:

1. adanya perbedaan warna kulit (*color line division*).
2. sistem pendidikan yang dikembangkan disesuaikan dengan status sosial masyarakat (Eropa, Timur Asing atau bumiputera).
3. bagi kelompok bumiputera masih dibedakan oleh status keturunan (bangsawan, priyayi, rakyat jelata).

Pemerintah kolonial membatasi akses pendidikan bagi kaum bumiputera, khususnya kaum perempuan. Aturan-aturan yang diterapkan oleh pemerintah kolonial salah satunya adalah membedakan posisi kedudukan antara lapisan atas dan lapisan bawah. Hal ini dibuktikan dengan adanya sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial untuk kaum elit dan kaum rendah. Pemerintah kolonial telah mendirikan Sekolah Kelas Satu (*Eerste Klasse School*) dan Sekolah Kelas Dua (*Twede Klasse School*) sebagai sekolah yang kedudukannya tidak sama satu sama lain. Hal ini dibedakan bahwa sekolah kelas satu diperuntukkan anak aristokrasi atau kaum elit yang berada, sedangkan sekolah kelas dua diperuntukkan untuk rakyat pada umumnya (Nasution,1987:51).

Anak-anak dari golongan Belanda sudah mendapatkan jalan untuk mengikuti sekolah lanjutan yaitu dengan masuk ke sekolah ELS (*Europese Lagere School*) yang merupakan sekolah rendah untuk anak Belanda. Sekolah ini hanya menerima sejumlah kecil anak-anak Indonesia dari kalangan priyayi yang kaya dengan pembatasan-pembatasan, pembayaran tinggi, dan kesulitan bahasa jumlahnya dapat dibatasi. Salah satu anak Indonesia yang sekolah di ELS yaitu Nyonya Sri Rijadi Soejatman yang merupakan anak dari seorang pejabat dalam bidang Pendidikan sebagai mantri guru (kepala sekolah). Hal ini jelas dipahami bahwa untuk memasuki sekolah ELS, calon murid adalah harus anak dari golongan bangsawan (ningrat) atau seorang pejabat yang diperkuat dengan surat keputusan dari residen (Hardi,1984:147).

4.2 Feodalisme (Adat Istiadat)

Feodalisme ini menyangkut adat feodal yang menarik garis pemisah yang tegas antara kaum laki-laki dengan kaum perempuan. Seorang gadis bangsawan dari tingkat rendah sampai atas pada waktu meningkat menjadi remaja, dimasukkan dalam “pingitan” dan tidak boleh keluar rumah lagi. Ini merupakan peraturan adat dan harus ditaati. Selama masa pingitan, semua hubungannya dengan masyarakat luar terputus, sampai pada saat gadis-gadis tersebut oleh orang tuanya dikawinkan dengan seorang pria yang bukan pilihannya sendiri dan bahkan seringkali juga belum pernah dikenalnya. Seringkali suaminya itu bukan perjaka lagi, melainkan orang yang jauh lebih tua dan bahkan sudah mempunyai isteri banyak. Gadis-gadis tersebut tidak dapat protes, karena itu kesempatan satu-satunya baginya untuk ke luar dari kurungan “pingitan”. Suaminya sewaktu-waktu dapat menceraikannya tanpa memberi sesuatu alasan atau meminta persetujuannya dan dapat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa seizin dainya. Sistem adat feodal seperti inilah yang hanya menguntungkan kaum lelaki dan merupakan penindasan bagi kaum perempuan . Maka dari itu perempuan-perempuan Indonesia perlu dibolehkan untuk belajar dan mendapatkan pendidikan, karena pendidikan akan mengangkat martabat kaum perempuan dan sebagai akibatnya, akan merobohkan sendi-sendi adat feodalisme (Soeroto,1984:5).

4.3 Budaya Patriarkhi

Patriarkhi adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Patriarki berasal dari kata patri-arkat, yang berarti struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal, sentral dari segala-galanya. Patriarki adalah penyebab penindasan terhadap perempuan. Budaya patriarkhi ini menjadikan kaum perempuan berada di bawah kedudukan kaum laki-laki, perempuan dianggap sebagai makhluk rendah dibandingkan dengan kaum laki-laki yang kedudukannya lebih tinggi. Dalam budaya ini, kaum laki-laki dianggap selalu benar dalam segala hal yang dilakukan dan berhak

untuk mengatur segalanya, sedangkan kaum perempuan mendapatkan penindasan dan kaum perempuan tidak diberi hak untuk melakukan apa yang diinginkannya.

4.4 Ortodoksi Agama

Kata ortodoks merupakan sebuah kata majemuk yang berasal dari bahasa Yunani dan dua kata yaitu *orthos* yang artinya benar dan *dokein* yang artinya pikiran, ajaran atau pendapat. Ortodoksi dalam sebuah ajaran agama artinya adalah ajaran yang benar, namun biasanya hal ini diartikan sebagai ajaran yang lama atau ajaran yang kuno atau ajaran yang fundamentalis. Ortodoksi agama adalah kekolotan dalam memahami dan menafsirkan ajaran agama. Agama menganggap bahwasannya pendidikan bagi kaum perempuan tidaklah penting, karena menurut agama kaum perempuan hanya berhak untuk memperoleh pendidikan. Hal ini disebabkan karena pemikiran yang kolot tentang pandangan agama. Kaum perempuan yang diciptakan oleh Tuhan Allah itu, diberikan dengan tujuan tertentu, yakni akan menjadi seorang penolong bagi suaminya (Notopuro,1977:1). Hal tersebut jelas terbukti dalam sistem pemikiran yang kolot dalam agama bahwasannya perempuan hanya berada di “wingking” atau berada di belakang saja, artinya kaum perempuan pada dasarnya harus tunduk kepada seorang suami dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Sedangkan kaum laki-lakilah yang berhak untuk mendapatkan pendidikan.

B. Usaha-Usaha Organisasi Perempuan Indonesia Menuntut Hak Pendidikan Pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1912-1928

1. Alasan Pentingnya Kaum Perempuan Indonesia Memperoleh Pendidikan.

Alasan utama atau alasan pokok kaum perempuan ingin mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki tidak lain adalah kaum perempuan Indonesia pada masa kolonial Belanda tidak mendapatkan keadilan atau diperlakukan tidak adil. Hal itu ditunjukkan oleh adat-

kebiasaan yang meliputi adanya kawin paksa, poligami, kaum pria mempunyai kekuasaan tak terbatas dalam perkawinan dan sesudah menginjak dewasa, gadis-gadis dilarang keluar rumah atau dengan kata lain dipingit (Wirjowratmoko,1953:15).

2. Latar Belakang Munculnya Organisasi Perempuan di Indonesia.

Dalam masa pertama dari pergerakan Indonesia, pergerakan perempuan hanya berjuang untuk mempertinggi kedudukan sosial. Soal-soal politik, seperti hak pemilihan yang sama tidak menjadi perundingan, sebab kaum laki-laki pun tidak mempunyainya. Soal kemerdekaan tanah air sama sekali masih jauh daripadanya. Fahaman tentang budi pekerti keagamaan dan adat masih menjadi rintangan terbesar baginya untuk dapat bertindak kearah yang lebih maju daripada yang terletak di depannya saja. Sebab-sebab yang mendorong untuk bergerak ialah fahaman-fahaman tentang kedudukan wanita di dalam perkawinan dan hidup keluarga (Wirjowratmoko,1953:14).

Sejarah gerakan perempuan di Indonesia telah melewati perjalanan yang sangat panjang. Jauh sebelum Indonesia merdeka, telah banyak muncul tokoh-tokoh dan organisasi-organisasi perempuan. Organisasi tersebut dibangun demi kepentingan kaum perempuan, untuk memperjuangkan posisi perempuan di dalam perkawinan dan kehidupan keluarga, mempertinggi kecakapan dan pemahaman ibu sebagai pemegang dan yang menentukan jalannya rumah tangga dalam suatu keluarga (Diniah,2007:2). Raden Ajeng Kartini dianggap sebagai pelopor pergerakan kaum perempuan Indonesia. Beliau merupakan perempuan Indonesia pertama yang mempunyai cita-cita untuk memajukan kaumnya dalam bidang pendidikan-pengajaran. Pergerakan perempuan dalam permulaan adalah gerak orang seorang, sebagai aksi dari beberapa orang perempuan sendiri-sendiri, tidak dalam susunan perempuan perkumpulan (Pringgodigdo,1980:20).

2.1 Organisasi Putri Mardika

Pada tahun 1912, pertama kali didirikan organisasi perempuan yang pertama di Jakarta yaitu yang dinamakan "Putri Mardika" atas prakarsa Boedi Oetomo. Organisasi ini bertujuan memberikan bantuan, bimbingan dan penerangan kepada gadis pribumi dalam menuntut pelajaran dan menyatakan pendapat di muka umum, memperbaiki hidup wanita sebagai manusia yang mulia, memberi beasiswa, menerima anggota pria dan menerbitkan majalah bulanan Putri Mardika. Organisasi ini diketuai oleh R.A. Theresia Sabaroedin dan wakil ketua R.A. Sutinah Joyopranoto (Kowani, 1986:42).

Putri Mardika adalah organisasi keputrian tertua dan merupakan bagian dari Budi Utomo. Organisasi ini berdiri untuk memperjuangkan pendidikan untuk perempuan, mendorong perempuan agar tampil di depan umum, membuang rasa takut, dan mengangkat perempuan ke kedudukan yang sama seperti laki-laki.

2.2 Organisasi Wanita Utomo

Atas prakarsa istri-istri Pengurus Besar Boedi Oetomo pada tanggal 24 April 1921 di Yogyakarta didirikan perkumpulan atau organisasi "Wanita Utomo". Organisasi ini diketuai oleh R.A. Rio Gondoatmodjo dan pelindung G.K.R (Gusti Kanjeng Ratu) Dewi. Sedangkan sebagai penulis adalah Nyonya Roro Suwanti dan anggota-anggotanya antara lain adalah Nyonya R.A. Abdulkadir dan Nyonya R.A. Sukonto. Organisasi ini tidak hanya dari kalangan istri anggota Boedi Oetomo saja, namun organisasi ini juga menerima anggota-anggota lain yang dari kalangan manapun. Tujuan dari organisasi ini adalah menjalin tali persaudaraan yang kukuh, saling tolong menolong, memajukan keterampilan kaum perempuan yang sesuai dengan tuntutan zaman (sebagai istri dan sebagai ibu) (Kowani,1986:45). Selain itu, organisasi atau perkumpulan Wanita Utomo ini bertujuan untuk menyebarkan pengetahuan dan kepandaian putri yang khusus.

2.3 Kartini Fonds (Dana Kartini)

Terbentuknya Dana Kartini tidak hanya karena peranan Mr. J.H. Abendanon, namun tidak dapat dilupakan jasa Nyonya Hilda de Booy-Boissevain yang telah bekerja aktif mencari dana dengan mengadakan propaganda keliling Nederland untuk memperkenalkan cita-cita Kartini di kalangan masyarakat Belanda. *Kartini Fonds* (Dana Kartini) atas prakarsa Tuan dan Nyonya C.Th. Van Deventer didirikan pada 27 Juni 1913 di kota 'sGravenhage. Ide dari "Dana Kartini" tersebut datang dari Nyonya Hilda de Booy-Boissevain, yang merupakan sahabat almarhumah Kartini. Komite "Dana Kartini" tersebut bekerja dengan motto "Di Bawah Naungan Sebuah Nama" (Soeroto,1984:431).

Perkumpulan ini mula-mula didirikan di Semarang kemudian di Jakarta. Tujuannya adalah untuk mendirikan sekolah-sekolah Kartini. Berkat usaha yang sungguh-sungguh dari anggota perkumpulan ini dan berbagai pihak yang simpatik terhadap perjuangan Kartini, berdirilah sekolah Kartini yang pertama di Semarang pada tahun 1913 dan juga di Jakarta (Ohorella, 1992:6). Kampanye propaganda untuk mendirikan Sekolah Kartini di Semarang itu berlangsung sangat memuaskan. Pada 15 September 1913 telah dapat dibuka Sekolah Kartini pertama di Jombang (Semarang Selatan) oleh residen Semarang. Pada tahun 1914 sekolah Kartini didirikan juga di Madiun, tahun 1916 di Malang dan Cirebon, tahun 1917 di Pekalongan, tahun 1918 di Indramayu, Surabaya, dan Rembang. Melalui sekolah-sekolah itu kemudian pula muncul para kader yang membentuk perkumpulan-perkumpulan wanita lainnya. Sekolah-sekolah lain dibangun di Jakarta, Malang, Madiun dan Bogor (Stuers,2008:76).

2.4 Organisasi Wanita Taman Siswa

Wanita Taman Siswa (WTS) adalah badan yang ada di dalam Taman Siswa. Organisasi Wanita Taman Siswa didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 1922, yang diketuai oleh Nyi Hadjar Dewantara yang waktu itu masih bernama R. Ayu Suwardi Suryaningrat, yang dibantu oleh ibu-ibu lainnya dalam mengurus organisasi

ini, diantaranya adalah: Ibu Rumsiah, Ibu Djumilah, Ibu Siti Marsidah, dan Ibu Sutatmo. Kelahiran Organisasi Wanita Tamansiswa dilatarbelakangi oleh kurangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan bagi rakyat Indonesia terutama bagi kaum wanita, adanya kepincangan-kepincangan pada masyarakat tradisional yang menghambat kemajuan wanita seperti poligami, kawin paksa dan lain sebagainya.

3. Perintis Pers Wanita

Bersamaan dengan timbulnya organisasi perempuan di Indonesia, maka perempuan Indonesia menerbitkan majalah dan surat kabar perempuan yang berfungsi sebagai penyebar gagasan kemajuan perempuan dan sebagai sarana praktis pendidikan dan pengajaran. Selain itu penerbitan majalah dan surat kabar ini juga sebagai bentuk usaha organisasi-organisasi perempuan Indonesia untuk memberikan pendidikan kepada kaum perempuan. Di dalam surat kabar dan majalah tersebut berisi salah satunya dukungan bagi perempuan Indonesia untuk mendapatkan pendidikan serta pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan di Indonesia (Kowani,1986:44).

Pada tahun 1909, telah terbit majalah dan surat kabar "Putri Hindia" yang diterbitkan jurnalis R.M. Tirta Adhisoerjodi Bandung, yang diterbitkan dua kali sebulan oleh golongan atas seperti R.A. Tjokroadikusumo dan lainnya (Kowani,1986:44).

Tiga tahun kemudian, pada tanggal 10 Juli 1912, di Padang terbit surat kabar "Sunting Melayu" yang terbit 3 kali seminggu yang sepenuhnya dikelola perempuan. Pemimpin redaksinya sampai tahun 1920 adalah Rohana Kudus. Sunting Melayu merupakan pusat kegiatan pemuda putri maupun perempuan yang telah bersuami, berisi politik, anjuran kebangkitan perempuan Indonesia dan cara menyatakan pikiran para penulisnya dalam bentuk prosa dan puisi.

Wanita Sworo terbit pada tahun 1913 di Pacitan, yang dipimpin oleh Siti Sundari dan terbit mula-mula dengan huruf dan bahasa Jawa, tetapi kemudian sebagian

berbahasa melayu. Pada tahun 1914 di Jakarta, terbit "Putri Mardika" sebagai majalah bulanan dari Putri Mardika. Artikel-artikelnya tertulis dalam bahasa Belanda, Melayu dan Jawa. Edisi Sunda terbit pada tahun 1918 di Bandung dengan nama Penuntun Istri. Dalam majalah ini, Putri Mardika berhaluan maju. Masalah permaduan, pendidikan campuran laki-laki dan perempuan, pemberian kelonggaran bergerak kaum putri, kesempatan pendidikan dan pengajaran lain-lain merupakan bahan perdebatan.

Isi majalah-majalah tersebut ialah persoalan-persoalan yang ada dalam keluarga dan masyarakat dan menyajikan pendirian-pendirian yang sesuai dengan nilai-nilai baru yang sedang berkembang, yaitu mengenai poligami, perkawinan anak-anak, pendidikan anak perempuan, tingkah laku dalam pergaulan, kesehatan dan kesusilaan (Suryochondro,1984:87). Majalah atau surat kabar pada masa itu dianggap terutama sebagai sarana untuk menyebarkan prinsip-prinsip kemajuan wanita dengan maksud memupuk kesadaran dalam kalangan anggota perkumpulan maupun pembaca-pembaca lainnya

4. Media Massa Sebagai Sarana Menuntut Hak Pendidikan Kaum Perempuan Indonesia Pada Masa Kolonial Belanda.

Sehubungan dalam rangka pencapaian atau usaha gerakan perempuan Indonesia menuntut hak pendidikan tersebut, mereka juga menggunakan media massa (surat kabar) yang merupakan salah satu media yang ampuh dan sangat efektif untuk menyebarkan gagasan, ide dan cita-cita mereka. Pers atau media massa ini digunakan sebagai penyebar gagasan kemajuan perempuan dan sebagai sarana pendidikan dan pengajaran agar pintu hati kaum perempuan terbuka dengan tanggung jawab yang semestinya (Kowani,1986:44). Tulisan yang tercantum dan dimuat di dalam media massa tersebut mengungkapkan mengenai pentingnya kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan, terutama juga keinginan kaum perempuan untuk terbebas dari belenggu adat feodalisme dan kedudukan perempuan di dalam

perkawinan dan hidup keluarga yang membuat kaum perempuan tidak dapat mendapatkan pendidikan (Pringgogidgo,1980:19).

C. Hasil Perjuangan Organisasi Perempuan Indonesia Menuntut Hak Pendidikan Pada Masa Kolonial Belanda Tahun 1912-1928.

1. Terbukanya Akses Pendidikan Bagi Kaum Perempuan Indonesia.

Secara lambat laun, akses pendidikan bagi kaum perempuan Indonesia sudah mulai terbuka. Akses pendidikan bagi kaum perempuan dari tahun ke tahun telah memberikan bukti bahwa perempuan Indonesia tidak hanya dijadikan dan dikatakan sebagai kaum yang rendah saja, namun perempuan juga mampu merubah kehidupan yang lebih baik yaitu demi mendapatkan hak pendidikannya. Kaum perempuan sudah mulai banyak yang mendapatkan fasilitas pendidikan, mendapatkan kesetaraan gender dan sudah dapat mengenyam pendidikan yang layak. Banyak kaum perempuan yang menjadi pemimpin dan menjadi lebih maju dibandingkan sebelumnya, misalnya Maria Ulfah Santoso yang tampil memimpin perjuangan langsung demi menolong dan memperjuangkan hak-hak hukum kemanusiaan perempuan-perempuan Indonesia dalam kesulitan perkawinan, Ny. Soewarni Pringgogidgo yang mampu mengupas kejelekan-kejelekan yang terjadi dalam perkawinan poligami (Idrus,1980:50). Pemerintah kolonial juga sudah banyak mendirikan sekolah-sekolah untuk kaum perempuan Indonesia, mereka sadar bahwa pendidikan juga perlu diberikan kepada kaum perempuan yang nantinya akan memberi dampak positif dalam kehidupan.

2. Munculnya Sekolah-Sekolah Khusus Bagi Kaum Perempuan.

Sekolah-sekolah khusus kaum perempuan secara lambat laun telah didirikan, salah satu contohnya adalah

Sekolah Kartini yang didirikan pada tahun 1913 dapat menjadikan perempuan mendapatkan pendidikan dan menjadi lebih maju. Setelah berdirinya Sekolah Kartini tersebut, pendidikan bagi gadis-gadis mendapat banyak kemajuan. Pada tahun 1918, pemerintah mendirikan sebuah Sekolah Guru (Kweekschool) untuk guru-guru wanita di Salatiga. Guru-guru lulusan ini berhak untuk mengajar di HIS (*Hollands Inlandse School*) dan juga di Sekolah Kartini. Sekolah guru yang terdapat di Salatiga tersebut, sudah sedikit banyak mendekati impian “sekolah kejuruan” Kartini dalam bidang pendidikan guru, meskipun taraf yang diinginkan tentunya semacam “Sekolah Guru Lanjutan” (*Hogere Kweekschool*). Tempatnya, Salatiga pun boleh dikatakan sangat tepat, karena hawanya segar dan sehat dan tidak terlalu dingin. Di sekolah tersebut, bahasa pengantar antara murid ialah bahasa Jawa, jadi kepribadian antara sesama murid tetap terpelihara. Pada tahun 1918 itu juga pemerintah merencanakan akan mendirikan sekolah umum untuk gadis dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar. Pada beberapa sekolah akan diberikan bahasa Belanda sebagai mata pelajaran. Pada tahun 1921, pemerintah juga membuka “Sekolah Normal” (*Normalscholen*) untuk pendidikan guru yang tingkatnya lebih rendah daripada *Kweekscholen*. *Kweekschool* dan *Normalschool* untuk wanita itu merupakan perwujudan sebagian dari cita-cita Kartini (Soeroto,1984:434). Selain itu, terdapat pula dua sekolah, yaitu sekolah pelatihan pemerintah untuk perempuan dan sekolah pelatihan tinggi di Salatiga. Diantara sekolah pelatihan guru swasta yang didirikan oleh misi Katolik dan Protestan, terdapat pula sekolah-sekolah yang didirikan oleh Aisyiyah dan Taman Siswa. Berikut ini tabel dari laporan pemerintah tentang pendidikan pada tahun 1928 mengenai jumlah murid yang mengikuti sekolah-sekolah pelatihan pada tahun 1927 (Stuers,2008:97).

3. Terselenggaranya Kongres Perempuan Pertama di Yogyakarta Tahun 1928.

Kongres Perempuan Indonesia yang pertama diadakan pada tanggal 22-25 Desember tahun 1928 di Pendopo Joyodipuran, Yogyakarta. Kongres perempuan yang pertama ini diadakan atas inisiatif dari 7 organisasi perintis pergerakan perempuan Indonesia, yaitu diantaranya Wanito Utomo, Wanita Taman Siswa, Putri Indonesia, Aisyiah, Jong Islamieten Bond Bagian Wanita, Wanita Katholik, Jong Java Bagian Wanita dan diprakarsai oleh Ny. Sukonto (Wanita Utomo), Nyi Hadjar Dewantara (Wanita Taman Siswa) dan Nn. Sujatin (Putri Indonesia) Kongres Perempuan ini dihadiri oleh 30 perkumpulan atau organisasi wanita (Kowani,1986:58). Kongres perempuan Indonesia yang pertama ini diketuai atau dipimpin oleh Ny. Soekonto. Perkumpulan-perkumpulan perempuan yang datang dalam kongres tersebut, yang memelopori cita-cita kemajuan dan kemerdekaan untuk perempuan Indonesia, menganjurkan adanya gabungan antara perkumpulan-perkumpulan tersebut. Dalam rapat-rapat terbuka antara lain dibicarakan soal-soal yang berikut: kedudukan wanita dalam perkawinan (wanita dipilih, dikawin dan dicerai diluar kemauannya), poligami, koedukasi (pendidikan anak perempuan dan laki-laki bersama-sama) dan sebagainya (Soewondo,1984:198). Tujuan diadakannya Kongres Perempuan ini adalah untuk menampung dan menyatukan tenaga dan pikiran kaum perempuan Indonesia (Kowani,1986:56). Kongres ini merupakan lembaran sejarah baru bagi pergerakan perempuan Indonesia, dimana organisasi perempuan mewujudkan kerja sama untuk kemajuan perempuan khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dalam kongres diambil keputusan: mendirikan badan permufakatan perkumpulan-perkumpulan perempuan dengan nama "Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI) yang bertujuan memberi penerangan dan perantara kepada perkumpulan yang tergabung di dalamnya, PPPI akan mendirikan dermasiswa (*studiefonds*) untuk anak-anak perempuan yang pandai tetapi tidak mampu, mengadakan kursus-kursus tentang kesehatan,

memberantas perkawinan kanak-kanak, dan memajukan pendidikan kepanduan untuk anak-anak perempuan. Kepada pemerintah diajukan tiga buah mosi, yaitu diantaranya:

1. menambah sekolah-sekolah untuk anak-anak perempuan.
2. supaya pada waktu nikah pemberian keterangan tentang ta'lik diwajibkan.
3. mengadakan peraturan untuk memberi sokongan kepada janda-janda dan anak-anak piatu pegawai negeri Indonesia (Soewondo,1984:198).

Kongres perempuan tahun 1928 merupakan tonggak sejarah bagi pergerakan perempuan Indonesia. Hari ulang tahun kongres tersebut dirayakan sebagai hari Ibu dan sampai saat ini diakui sebagai lahirnya gerakan perempuan Indonesia. Para tokoh nasionalis, komentator surat kabar, dan pejabat kolonial semuanya menyambutnya sebagai suatu keberhasilan luar biasa dan diakui sebagai titik awal sejarah gerakan perempuan tersebut (Blackburn,2007:1).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa pada masa kolonial Belanda perempuan tidak bisa memperoleh pendidikan yang layak. Kebijakan yang diterapkan oleh Belanda, mengatur bahwa pendidikan hanya untuk kalangan elit dan dikhususkan untuk laki-laki. Akses pendidikan untuk kaum perempuan dibatasi, hanya perempuan dari golongan elit dan keturunan Belanda atau Eropa yang diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang layak. Adat istiadat juga merupakan penghalang bagi kaum perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Perempuan dipandang sebagai makhluk kelas dua yang posisinya selalu berada dibawah kaum laki-laki. Perempuan tidak dapat diprioritaskan menjadi makhluk utama, melainkan laki-lakilah yang menjadi kelas satu dalam masyarakat.

Untuk mendapatkan hak pendidikannya, kaum perempuan membentuk organisasi-organisasi yang

bertujuan untuk menjadikan kaum perempuan menjadi cerdas, terampil dan mandiri. Perempuan Indonesia menerbitkan majalah dan surat kabar perempuan yang berfungsi sebagai penyebar gagasan kemajuan perempuan dan sebagai sarana praktis pendidikan dan pengajaran. Selain itu penerbitan majalah dan surat kabar ini juga sebagai bentuk usaha organisasi-organisasi perempuan Indonesia untuk memberikan pendidikan kepada kaum perempuan. Melalui pers/media massa yang diwujudkan dalam surat kabar merupakan usaha gerakan perempuan Indonesia menuntut hak pendidikan. Dalam usaha penyampaian gagasan, media pers merupakan sarana yang efektif untuk menyampaikan informasi. Munculnya organisasi-organisasi perempuan dengan tujuan dan usaha-usahnya tersebut, kaum perempuan Indonesia secara lambat laun telah memperoleh pendidikan.

Sekolah-sekolah bagi kaum perempuan secara bertahap telah didirikan. Kaum perempuan sudah banyak yang bersekolah, mendapatkan pendidikan yang selayaknya, perempuan menjadi lebih maju dan pendidikan sudah dibuka bagi kaum perempuan. Selain itu secara lambat laun keadaan lekas berubah menjadi lebih baik dari tahun ke tahun, misalnya poligami, kawin paksaan, berlakunya kekuasaan suami yang tidak terbatas terhadap perceraian, membiarkan gadis-gadis bodoh akibat larangan meyekolahkanya setelah mulai dewasa, perkawinan anak-anak dan sebagainya sudah mulai berkurang. Perempuan secara lambat laun telah mampu untuk bangkit dalam menghilangkan kebijakan pemerintah kolonial yang telah membatasi akses pendidikan bagi kaum perempuan dan kekangan adat istiadat, mereka berjuang demi mendapatkan pendidikan agar tidak selalu dipandang lemah dalam segala hal. Terselenggaranya Kongres pertama perempuan Indonesia yang diselenggarakan di Yogyakarta pada tanggal 22 sampai 25 Desember tahun 1928. Hasil kongres tersebut yang banyak dibicarakan yaitu mengenai pentingnya pendidikan bagi kaum perempuan,

karena perempuan itu harus memiliki pendidikan yang cukup sebagai bekal untuk perbaikan umat.

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran terkait dengan penelitian yang dilakukan adalah.

1. Bagi mahasiswa dan calon guru sejarah, dapat menambah penguasaan materi Sejarah Nasional Indonesia;
2. Bagi organisasi perempuan di Indonesia, diharapkan dapat merumuskan cita-cita organisasi-organisasi perempuan dalam meningkatkan pendidikan bagi kaum perempuan sehingga peran seorang perempuan dapat berjalan dengan baik sebagai pendidik utama bagi para putra putri bangsa;
3. Bagi kaum perempuan pada umumnya diharapkan dapat meningkatkan peran sertanya agar menjadi perempuan yang berpotensi dan mandiri tanpa harus meninggalkan kondratnya sebagai wanita, sehingga bisa menjadi perempuan yang baik bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.
4. Bagi ilmu pengetahuan, dapat menambah perbendaharaan ilmu perjuangan organisasi perempuan Indonesia dalam menuntut hak pendidikan pada masa kolonial Belanda Tahun 1912-1928 serta pengembangan ilmu Sejarah di Indonesia umumnya.
5. Bagi Almamater, sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi;

UCAPAN TERIMA KASIH

Siwi Tyas Fheny Cahyani mengucapkan terimakasih kepada Bapak Drs. Kayan Swastika, M.Si dan Bapak Drs. Sumarjono, M.Si yang telah meluangkan waktu, memberikan pengarahan, dan saran dengan penuh kesabaran demi terselesaikannya jurnal ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan semangat untuk terselesainya penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdurrahman, D. 2007. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media.
- [2] Blackburn, S. *Terjemahan Atashendartini Koesoemo Oetoyo-Habsjah*. 2007. *Kongres Perempuan Pertama. Tinjauan Ulang Jakarta* : Yayasan Obor Indonesia.
- [3] Depdikbud. 1985. *Pendidikan Di Indonesia Dari Jaman Ke Jaman*. Jakarta : Balai Pustaka.
- [4] Fauzie, dkk. 1993. *Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.
- [5] G.A. Ohorella, dkk. 1992. *Peranan Wanita Indonesia dalam Masa Pergerakan Nasional*. Jakarta: Depdikbud.
- [6] Hardi, L. 1984. *Sumbangsihku Bagi Ibu Pertiwi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- [7] Idrus, H. 1980. *Wanita Dulu Sekarang Dan Esok*. Medan: Penerbit Waspada.
- [8] Kowani, 1986. *Sejarah Setengah Abad Kesatuan Pergerakan Wanita Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- [9] Kuntowijoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya.
- [10] Nasution, S. 1987. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Bandung : Jemmars.
- [11] Notopuro, H. 1977. *Masalah Wanita Kedudukan dan Peranannya*. Bandung: Binacipta.
- [12] Pane, A. 2000. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Jakarta : Balai Pustaka.
- [13] Poesponegoro, M. D & Notosusanto, N. 2008. *Sejarah Nasional Indonesia V*. Jakarta : Balai Pustaka.
- [14] Pringgodigdo, A. K. 1980. *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta : Dian Rakyat.
- [15] Soeroto, S. 1983. *Kartini Sebuah Biografi*. Jakarta: Gunung Agung.
- [16] Stuers, Cora. *Terjemahan Ruth Indiah Rahayu*. 2008. *Sejarah Perempuan Indonesia: Gerakan dan Pencapaian*. Jakarta : Komunitas Bambu.
- [17] Subadio, Ihromi. 1983. *Peranan Dan Kedudukan Wanita Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- [18] Suryochondro, S. 1984. *Potret Pergerakan Wanita di Indonesia* . Jakarta : CV. Rajawali.